

Kajian Deskriptif tentang Pendidikan Kewarganegaraan dalam Membentuk Pola Berpikir Kritis Mahasiswa

Benedicta Dwi Adventyana^{a,1*}, Dinie Anggraeni Dewi^{a,2}

^a Universitas Pendidikan Indonesia, Indonesia

¹ benedictadwi.ursula7@upi.edu

*korespondensi penulis

Informasi artikel

Received: 10 Juli 2021;

Revised: 23 Juli 2021;

Accepted: 28 Juli 2021.

Kata kunci:

Pendidikan

Kewarganegaraan;

Mahasiswa;

Berpikir Kritis.

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan Pendidikan Kewarganegaraan dalam membentuk pola berpikir kritis mahasiswa. Situasi yang terjadi dalam dunia pendidikan, seseorang sangat menjadi sorotan yang paling penting. Apabila hal ini hilang, makna pendidikan pun akan mulai pudar. Pendidikan kewarganegaraan adalah kunci di mana hal ini bisa terkontrol dengan baik. Pendidikan kewarganegaraan semestinya mengajarkan hak dan kewajiban mahasiswa dalam konteks menjadi warga negara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode ini lebih menganalisis Pendidikan kewarganegaraan dengan apa yang harus dimiliki oleh seorang mahasiswa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hasil penelitian menemukan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan dilakukan dengan pengajaran dan pelatihan dengan memberi ruang-ruang pertanyaan bagi mahasiswa. Dengan memiliki dan melatih kemampuan bertanya, karakter dan perilaku mahasiswa bisa bersikap kritis. Namun, sikap kritis tersebut memerlukan norma sebagai pengendali agar mahasiswa tidak jatuh pada bentuk skeptisisme dan arogansi. Arahan dalam pembelajaran dan pelatihan bagi mahasiswa untuk bersikap kritis dipergunakan untuk memperjuangkan keadilan agar keadaan negara menjadi lebih baik.

ABSTRACT

The Descriptive Study on Citizenship Education in Shaping Students' Critical Thinking Patterns. The purpose of this study is to describe Citizenship Education in shaping students' critical thinking patterns. The situation that happens in the world of education, one is very important spotlight. If this is lost, the meaning of education will begin to fade. Citizenship education is the key where this can be well controlled. Citizenship education should teach students the rights and obligations in the context of becoming a citizen. This research uses qualitative method with descriptive approach. This method further analyzes citizenship education with what a student should have in national and state life. The results found that Citizenship Education is conducted by teaching and training by providing question rooms for students. By having and practicing the ability to ask questions, the character and behavior of students can be critical. However, such critical attitudes require norms as controllers so that students do not fall into a form of skepticism and arrogance. Direction in learning and training for students to be critical is used to fight for justice for the better state of the country.

Keywords:

Critical Thinking;

Students;

Citizenship Education.

Copyright © 2021 (Benedicta Dwi Adventyana & Dinie Anggraeni Dewi). All Right Reserved

How to Cite : Adventyana, B. D., & Dewi, D. A. (2021). Kajian Deskriptif tentang Pendidikan Kewarganegaraan dalam Membentuk Pola Berpikir Kritis Mahasiswa. *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 1(7), 215–222. <https://doi.org/10.56393/decive.v1i7.264>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Di dalam dunia pendidikan, mahasiswa adalah sebutan akhir sebagai seseorang yang memiliki kewajiban untuk belajar. Singkatnya, kampus menjadi tempat mencari ilmu. Pencarian ilmu melalui proses belajar merupakan hal yang paling utama dan terus-menerus dilakukan dalam membentuk cara berpikir sistematis, dan kritis. Mahasiswa yang berpikir sistematis dan kritis memiliki peranan penting untuk membangun bangsa dan negaranya di waktu yang akan datang. Mereka turut berpartisipasi menjadi warga negara yang mengubah negara menjadi lebih baik. Untuk itu, peran mahasiswa dilakukan dengan memberikan pendapat, terlibat dalam organisasi yang kreatif dan konstruktif, bertindak dalam ruang-ruang sosial kemanusiaan. Mahasiswa dengan demikian adalah kaum muda yang memiliki pandangan yang komprehensif (Akbar, 2016).

Mahasiswa memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat karena idealnya mahasiswa akan menjadi panutan dalam masyarakat. Mengapa? Karena mahasiswa dinilai akan berperan dengan pengetahuan pendidikan yang dimilikinya dan juga mengetahui dan melaksanakan norma-norma yang berlaku disekitarnya sehingga mengetahui mana yang baik dan yang tidak, dan terbentuklah pola pikir yang ideal. Tetapi hal ini kadang diremehkan oleh masyarakat lain karena sebelumnya pernah ada kasus mahasiswa cenderung teori saja dan tidak bisa praktek dan karena suatu hal ini kepercayaan dari lingkungan menurun. Maka dari itu mahasiswa harus tahu apa yang harus menjadi perannya. Peran mahasiswa ada empat, yaitu *agent of change*, *social control*, *iron stock* dan *moral force* (Istichomaharani, & Habibah, 2016).

Di dalam kehidupan masyarakat pasti ada yang namanya suatu masalah. Peran pertama mahasiswa adalah *agent of change*. Mahasiswa dan mahasiswi itu sendiri sangat berpengaruh dan memegang peranan penting dalam agen of change ini atau penggerak sebuah perubahan. Hal ini memiliki makna bahwa mahasiswa adalah penggerak perubahan. dari suatu masalah tersebut harus ada yang namanya *problem solving* atau pemecahan masalah agar dapat keluar dari masalah tersebut. mahasiswa harus bisa terbentuk pola pikir yang baik agar dapat menjadi agen sebuah perubahan di tengah-tengah masyarakat sehingga bisa mengajak masyarakat tersebut menyelesaikan masalah dan keluar dari permasalahan tersebut.

Lalu yang kedua ada *social control*, dalam hal ini mahasiswa dituntut untuk menjadi panutan dalam masyarakat. Mengapa dinilai demikian? karena mahasiswa memiliki tingkat pendidikan dan pengetahuan yang tinggi sehingga dapat diartikan bahwa mahasiswa bisa membedakan hal yang baik dan buruk, mengikuti yang melaksanakan norma-norma yang ada dan juga terbentuk pola pikir yang baik sehingga bisa menjadi contoh untuk masyarakat sekitar. Dalam hal ini mahasiswa dituntut untuk memiliki sikap yang kritis dan proaktif, dan bukan sebagai pengamat saja atau nilai tetapi menjadi partisipasi aktif dalam kehidupan masyarakat bersama ide-idenya.

Generasi penerus yang tangguh atau *iron stock*. Dalam hal ini mahasiswa menjadi manusia yang akan menggantikan generasi sebelumnya dengan dibekali ilmu yang dia miliki. Mahasiswa adalah aset, cadangan, dan juga harapan sebuah bangsa untuk masa depannya. Dalam hal ini sama seperti sebelumnya, mahasiswa dituntut untuk menjadi aktif berperan kehidupan sekitarnya menggunakan ilmu-ilmu yang telah dia dapatkan di perkuliahan. Yang terakhir adalah suri tauladan atau *moral force*. Mengenai hal ini, mahasiswa dituntut agar memiliki akhlak yang baik karena mahasiswa itu sendiri menjadi pelajaran di tengah-tengah masyarakat. Dimulai dari tingkah laku mahasiswa di kelas kita sehingga mahasiswa harus menempatkan dirinya dalam kehidupan masyarakat. Terkadang apabila ada banyak siswa yang memiliki sikap yang kurang baik, biasanya para masyarakat tersebut akan berpikiran bahwa semua mahasiswa akan berperilaku seperti itu.

Kehidupan mahasiswa di dunia yang sesungguhnya kerap kali ada dalam bentuk aksi demonstrasi mahasiswa sangat tidak bisa diduga hal itu akan berjalan dengan baik atau tidak. Aksi unjuk rasa atau demonstrasi di Indonesia sendiri sudah cukup banyak terjadi, yang paling besar yaitu reformasi Indonesia 1998. Pada tahun 1998 mahasiswa menuntut untuk mundurnya Soeharto menjadi agenda

Nasional gerakan mahasiswa yang pada saat itu bertempat di gedung DPR atau MPR Jakarta. Tentukan tentukan dari mahasiswa yaitu naiknya harga BBM dan juga ongkos pada tanggal 4 Mei 1998. Kericuhan saat aksi-aksi demonstrasi pada mahasiswa itu akan tergantung kepada mahasiswa itu sendiri dan kepada kondisi yang ada pada saat mereka turun untuk melakukan aksi tersebut. Kericuhan tidak bisa dihindari apabila ada satu penyebab yang menyebabkan hal itu terjadi.

Keadaan ini bisa dikatakan sangat ricuh karena adanya aksi saling memukul satu sama lain dan pada akhirnya aparat turun langsung untuk meredam kericuhan tersebut. Sama halnya dengan kejadian yang ada di Denpasar, Bali. Mahasiswa Papua yang berada di daerah tersebut, menggelar longmarch ke bundaran Renon yang disebabkan oleh penolakan revisi UU otonomi khusus Papua. Ini mengalami kericuhan sehingga aparat turun langsung untuk meredam dan mengangkut mahasiswa itu ke Mapolresta Denpasar (Saubani, dalam harian *Republika*, Selasa 30 Mar 2021) Sebagai bentuk pengamanan dan pemeriksaan adalah suatu bentuk penjelasan bagaimana cara aparat tersebut bertindak.

Pendidikan kewarganegaraan menjadi poin penting dalam sebuah jenjang pendidikan. Menurut Azyumardi Azra, pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan yang mengkaji dan membahas tentang pemerintahan, konstitusi, lembaga lembaga demokrasi, rule of law, HAM, hak dan kewajiban warga negara serta proses demokrasi. Tak jauh berbeda dengan Zamroni, yang berpendapat bahwa Pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan demokrasi yang bertujuan untuk mempersiapkan warga masyarakat yang berpikir kritis dan bertindak demokratis (Ubaedillah, 2016). Jika dilihat dari pandangan ataupun pendapat dari dua ahli di atas, memiliki makna bahwa Pendidikan kewarganegaraan dituntut untuk mengetahui kehidupan yang sesungguhnya di masyarakat. Setiap warga negara dituntut untuk dapat hidup berguna dan bermakna bagi negara dan bangsanya serta mampu mengantisipasi perkembangan dan perubahan masa depannya. maka dari itu bukan hanya dari siswa saja yang perlu mempelajari pendidikan kewarganegaraan, tetapi mahasiswa pun harus memiliki pegangan yang utuh untuk melaksanakan perannya dan menghadapi tantangan-tantangan yang akan selalu ada di setiap generasi dan waktunya (Novianti, Firmansyah, & Susanto, 2021) .

Sebagai syarat sebuah ilmu pengetahuan ilmiah, ilmu tersebut harus memiliki objek. jika ditinjau dalam pendidikan kewarganegaraan sendiri objek itu akan dibagi dua, yakni objek material dan objek formal. Objek material dalam pendidikan kewarganegaraan adalah menyangkut segala hal yang berkaitan mengenai warga negara yang baik secara empirik maupun non empirik, yang membicarakan seputar wawasan sikap dan perilaku warga negara yang seharusnya dalam kehidupan berbangsa dan negara. Berbeda dengan objek material, objek formal mencakup dua segi yaitu hubungan antara warganegara dengan negaranya dan segi pembelaan negara tersebut. Dalam pendidikan kewarganegaraan juga, pembelajaran ini menggunakan metode yaitu analitico synthetic, yaitu suatu perpaduan metode analisis dan sintesis karena pendidikan kewarganegaraan sendiri banyak membicarakan yang berada di dalam objek kebenaran itu sendiri yang berkaitan dengan hasil budaya dan juga objek sejarah maka digunakan juga metode hermeneutika atau sering disebut dengan metode untuk penemuan makna dibalik objek. Selain itu juga ada metode koherensi historis, di mana orang yang mempelajarinya akan mendapatkan pemahaman, penafsiran dan interpretasi. Metode tersebut dapat dikaitkan dengan hukum-hukum yang ada salah satunya penarikan kesimpulan dari UUD 1945 itu sendiri.

Sebagai ilmu pengetahuan yang ilmiah, kebenaran ilmu tidak terbatas oleh waktu, situasi maupun jumlah tertentu. Dalam mata kuliah pendidikan kewarganegaraan diajarkan kepada mahasiswa, kajian-kajiannya memiliki sifat yang universal atau dalam artian makna yang juga intisarinnya itu bersifat universal yang mendukung kebenaran atas kesimpulan dan pertanyaan. Jika lebih teliti lagi, ada perbedaan prinsip antara ilmu dengan pengetahuan. ilmu merupakan kumpulan dari berbagai pengetahuan yang memiliki sifat sistematis objektif diperoleh dengan metode seperti observasi, eksperimen, dan klasifikasi. Sedangkan pengetahuan adalah keseluruhan pengetahuan yang belum tersusun baik itu dari mata fisik maupun nonfisik sehingga pengetahuan ini adalah informasi yang

berupa common sense atau dalam artian memiliki metode dan mekanisme tertentu. ketahuan ini bisa ber mulai atau berpacu dari adat dan tradisi yang ada di dalam kehidupan sehari-hari sehingga menjadi suatu kebiasaan. Maka dari itu pengetahuan akan bersifat kabur kabur atau samar-samar.

Pendidikan kewarganegaraan memiliki peran penting dalam suatu kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidikan kewarganegaraan di Indonesia juga berkontribusi penting dalam menunjang tujuan bernegara Indonesia. Pendidikan kewarganegaraan secara sistematis adalah dalam rangka perwujudan fungsi dan tujuan pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945 Pendidikan kewarganegaraan berkaitan dan berjalan seiring dengan perjalanan pembangunan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidikan kewarganegaraan merupakan bagian integral dari ide, instrumentasi, dan praksis kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Indonesia (Winataputra, 2008).

Kewajiban dan hak seorang mahasiswa masih menyangkut pelajaran yang ada di bangku sekolah dari SD sampai SMA atau SMK yaitu pendidikan kewarganegaraan. Sejak SD, siswa sudah ditanamkan bagaimana dirinya memiliki sikap cinta tanah air dan bangga akan negaranya sendiri sehingga kelak hal yang diinginkan adalah para siswa yang duduk di sekolah dasar saat ini kedepannya akan memperjuangkan kemerdekaan yang sudah dan akan menjadi hak negaranya sendiri yaitu Indonesia. Di SMP dan di SMK atau SMA pelajaran ini pun masih tetap diberikan. Hal yang dibahas dalam pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan ini tidak jauh dari apa yang telah dipelajari saat sesudah duduk di sekolah dasar (Ila, & Ladamay, 2021). Hanya yang membedakan adalah tingkat kedalaman materi yang lebih dalam. Setelah siswa-siswi lulus dari 12 tahun bersekolah, sebagian siswa akan melanjutkan perjuangannya di Perguruan Tinggi. Jurusan apapun dan kampus manapun Pendidikan kewarganegaraan akan selalu ada yang disertai atau dibarengi dengan pendidikan Pancasila. Tapi mengapa masyarakat masih memandang bahwa mahasiswa bisanya hanya demo dan menuntut sehingga memperlambat atau memperkeruh kondisi yang ada di negara ini? Kalimat di samping seringkali diucapkan oleh masyarakat atau lingkungan dengan tertentu lainnya yang tidak paham akan kondisi tersebut. Padahal berpendapat adalah kebebasan dan hak setiap orang bukan? Jadi apa fungsi pendidikan kewarganegaraan bagi mahasiswa apabila pendidikan kewarganegaraan di SD sampai SMA sudah selalu ada dan menanamkan Pendidikan karakter yang sudah terbentuk sejak kecil? Apakah itu tidak membantu sama sekali untuk karakter yang dimiliki bekal dia menjalani sebuah kehidupan di luar sana khusus dimulai dari menjadi seorang mahasiswa?

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode ini lebih menggambarkan Pendidikan kewarganegaraan dengan apa yang harus dimiliki oleh seorang mahasiswa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang mengkaitkan dengan masalah-masalah yang hadir di dalam hal tersebut. Penelitian deskriptif dengan menggunakan sumber dari pustaka ilmiah berupa buku, dan artikel ilmiah. Penelitian dengan metode untuk menggambarkan suatu hasil penelitian untuk mencari makna dengan interpretasi yang tepat sehingga penelitian ini bisa mendeskripsikan suatu gejala dan juga peristiwa yang terjadi pada saat sekarang atau masalah aktual. Peneliti menganalisis data dengan mendeskripsikan dan memberi interpretasi yang kemudian menarik kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Jika bicara dengan peran mahasiswa terhadap aksi-aksi demokrasi di Indonesia seharusnya harus mengetahui dulu apa dan maksud tujuan dari sistem demokrasi yang ada di Indonesia agar tidak ada salah penangkapan atau salah mengartikan suatu kondisi. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa (Zaini, 2018). Demokrasi juga bisa diartikan dengan sebuah sistem pemerintahan yang melibatkan rakyat dalam berlangsungnya

tata kelola pemerintahan, sistem ini lebih mengafirmasi bahwa pemerintahan ada dan berakhir secara komprehensif bukan untuk segelintir elit penguasa singgasana perpolitikan yang seperti sering dilihat. ada beberapa ciri yang berada di dalam negara demokrasi seperti terjaminnya hak kebebasan berpendapat, kebebasan pers, hak atas kesetaraan dan hak atas kepemilikan. Tapi terkadang demonstrasi pun berubah menjadi radikal. Hampir di setiap sudut nusantara, sering meluapkan kekecewaan berubah bentuk menjadi aksi massa. Tidak lagi bersifat elegan seperti yang diharapkan oleh banyak pihak, tidak pula biasa saja sesuai harapan demokrasi yang dikonstruksi negara.

Perusakan fasilitas umum, pemblokiran jalan, pembakaran ban bekas, sampai kekerasan horizontal adalah bentuk nyatanya. Jelas bukan persoalan yang sederhana, dan memang terlalu naif untuk disepelekan. Jika dikaitkan dengan topik Pendidikan Kewarganegaraan dengan mahasiswa dan kehidupan berdemokrasi, Pendidikan kewarganegaraan pada hakikatnya adalah sebuah bentuk pendidikan untuk generasi penerus yang bertujuan agar mereka menjadi warga negara yang berpikir tajam dan sadar mengenai hak dan kewajibannya dalam hidup bermasyarakat dan bernegara, juga bertujuan untuk membangun kesiapan seluruh warga negara agar menjadi warga dunia (*global society*) yang cerdas. Sehingga dengan hak dan kewajiban yang sama setiap warga Indonesia tanpa harus dikomando atau diperintah harus ikut berperan aktif dalam melaksanakan bela negara. Sehingga hal ini bisa berkaitan secara langsung dengan apa yang dimiliki mahasiswa sebagai peranya.

Jika dilihat dari perannya, mahasiswa memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari khusus kehidupan bermasyarakat yang tak terkecuali kehidupan berbangsa dan negara. Peran mahasiswa ini penting bukan sekedar hanya untuk dirinya sendiri, maka dari itu pengetahuan harus membekali mereka untuk bisa terjun langsung di dalam tengah-tengah masyarakat. Pengetahuan bukanlah menguji seberapa otak mampu untuk menjawab sebuah persoalan, karena menjawab saja tidak cukup. Jawaban yang sesungguhnya adalah tingkah laku penyelesaian itu sendiri. dengan berdasarkan pengetahuan yang dimiliki dan bekal ilmu yang telah didapatkan, mahasiswa diharapkan untuk bisa sebagai pembawa atau penuntun masyarakat ke arah yang lebih baik dan keluar dari suatu permasalahan dengan dialog transformatif (Gultom, 2010).

Tapi mengapa harus dikaitkan dengan pendidikan kewarganegaraan? Mengapa harus ada mata kuliah pendidikan kewarganegaraan yang wajib diikuti semua mahasiswa di jurusan maupun di kampus mana pun? Jika dilihat dari perannya sendiri, mahasiswa harus turun langsung di kehidupan masyarakat. Dalam artian mahasiswa tersebut butuh yang namanya pegangan atau pedoman agar dia tidak sesat dan agar dia tidak salah menuntun yang dituntun. ilmu yang bekerja negara hal ini bisa digunakan oleh mahasiswa untuk menuntun mereka yang nantinya akan menuntun masyarakat itu sendiri kepada Indonesia yang lebih baik dan Indonesia yang lebih siap untuk menjawab tantangan-tantangan apa saja yang ada di kemudian hari. Apakah mahasiswa itu perlu takut akan tantangan itu sendiri? Rasa takut itu dirasa perlu untuk dimiliki setiap mahasiswa, karena berawal dari rasa takut lah kita akan mencari tahu apa yang seharusnya mahasiswa lakukan dan mahasiswa bekal untuk kehidupan sehari-hari.

Berawal dari rasa takut, mahasiswa tersebut membawa rasa percaya dirinya untuk memperoleh ilmu yang lebih banyak lagi yang terus belajar dari mana pun. dalam pendidikan kewarganegaraan mahasiswa dituntut untuk lebih melek kepada negaranya sendiri entah itu dari segi norma maupun dalam segi kondisi yang ada di kehidupan berbangsa dan negara. Mahasiswa seharusnya tahu apa yang menjadi perannya, tetapi seharusnya tidak merasakan bahwa dia yang memiliki ilmu yang harus lebih tahu daripada segalanya. Kerendahan hati dalam mencari ilmu juga perlu diterapkan dalam hal ini. Berawal dari pendidikan kewarganegaraanlah bekal mahasiswa bisa dikatakan terpenuhi dari segi pemikiran atau intelektual. Bagaimana cara merealisasikan itu akan balik lagi kepada mahasiswa itu sendiri di tengah-tengah masyarakat. Berhasil atau tidaknya bisa dilihat dari kondisi lingkungan sekitar mahasiswa apakah yang menolak atau pun bisa menerima dan mengenal mahasiswa itu sendiri. Sebagai contohnya, banyaknya norma yang harus dikenal dan harus dilaksanakan berawal dari mahasiswa tersebut karena seseorang yang tadi mahasiswa adalah panutan di lingkungan masyarakat. Seperti

Undang-Undang 1945, landasan hidup seperti Pancasila, norma-norma seperti norma beretika, norma berbicara atau mengeluarkan pendapat, dan norma lainnya (Ismail Nurdin, 2017).

Sebagian masyarakat terkadang berpikiran yang buruk mengenai mahasiswa. Kenapa harus mengeluarkan pendapatnya menggunakan aksi-aksi yang memerlukan turun ke jalan, demo, dan apapun yang mengganggu aktivitas yang seharusnya tidak terjadi sehingga bisa memperlambat kegiatan? Mengapa harus segerombolan orang yang turun aksi? Kenapa tidak hanya satu atau dua orang yang langsung datang ke kantornya saja? Apakah hal ini bisa disebutkan mereka normal dalam hal mengeluarkan pendapatnya atau sudahkah mahasiswa mengikuti norma yang berlaku dan seharusnya untuk mengeluarkan pendapatnya di negara Indonesia ini? Pertanyaan itu sering muncul dalam kehidupan masyarakat, entah dari masyarakat yang mengomel karena kegiatannya terhambat oleh sebuah aksi yang meresahkan juga karena dapat mengganggu dan merusak fasilitas umum. Maka dari itu peran pendidikan kewarganegaraan tersebut sangatlah penting menjadi pedoman ini.

Di dalam norma atau aturan yang berlaku di Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945, terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan saat menyampaikan pendapat di muka umum. unjuk rasa bukanlah hanya sebatas turun demo atau turun aksi terus teriak paling kencang dan merusak fasilitas daerah tersebut, tapi unjuk rasa pun harus mengikuti aturan yang ada di negara tersebut. Dimana bumi dipijak disitu langit dijunjung. Di Indonesia sendiri ada beberapa aturan saat melakukan penyampaian pendapat di muka umum atau bisa disebut sebagai unjuk rasa atau demonstrasi. Untuk menyampaikan pendapat ada beberapa cara, yaitu yang pertama ada unjuk rasa atau demonstrasi, pawai rapat umum, atau mimbar bebas. Mahasiswa sendiri sering menggunakan unjuk rasa (Yuliawati, 2019). Unjuk rasa merupakan kegiatan yang dilakukan baik sendiri atau sekelompok orang untuk mengeluarkan pikiran dan pendapatnya secara lisan tulisan dan lainnya secara demonstratif di muka umum. Ketentuan-ketentuan unjuk rasa ini tidak boleh dilakukan di lingkungan istana kepresidenan, tempat-tempat ibadah, instalasi militer, rumah sakit, bandara atau pelabuhan udara dan laut, stasiun kereta api terminal angkutan darat dan objek-objek vital nasional.

Untuk waktunya sendiri tidak boleh dilakukan pada hari besar nasional. selain itu pula ada aturan keras bahwa peserta demonstrasi tersebut tidak boleh membawa benda-benda yang membahayakan demi keselamatan umum. maka dari itu dari kasus ini bisa dilihat bahwa masih banyak para mahasiswa yang aksi turun ke jalan, masih membawa benda-benda tajam sehingga tidak memiliki kepercayaan yang seratus persen dari lingkungan masyarakat. Lantas bagaimana cara meningkatkan kepercayaan itu sendiri di tengah masyarakat yang telah percaya bahwa mahasiswa turun itu tidak akan baik-baik saja? Alasan inilah yang memperkuat bahwa Pendidikan kewarganegaraan itu harus hadir di dalam kehidupan masyarakat, juga alasan ini agar Pendidikan kewarganegaraan dikembangkan di kehidupan mahasiswa agar mahasiswa tidak salah jalan (Muhibbin, & Sumarjoko, 2016). Hal ini bisa dijadikan pegangan dan pedoman mahasiswa agar dia tahu yang sebenarnya diperbolehkan dan tidak diperbolehkan di kehidupan masyarakat itu apa saja. Sebenarnya semua hal yang diperbuat individu akan menjadi tanggung jawab masing-masing. Tetapi negara Indonesia adalah negara hukum, yang seharusnya masyarakat itu tahu cara mereka bertingkah laku dan beretika baik untuk dirinya sendiri maupun untuk lingkungan sekitarnya (Gultom, 2016). Pendidikan kewarganegaraan ini bisa dilihat sebagai arahan bagaimana menjadi warga negara yang baik dan tahu negaranya akan dibawa kemana. Dari sinilah nilai-nilai karakter akan selalu ditanamkan dan akan selalu ditekankan. memiliki ilmu yang banyak akan jauh lebih kalah dengan orang yang mempunyai sedikit ilmu tetapi memiliki etika yang baik.

Pendidikan kewarganegaraan dengan demikian sangat penting untuk tetap dipelajari di kalangan mahasiswa. Jika ia ingin berpendapat ya harus tahu apa yang seharusnya dilakukan. Mulai dari tata cara penyampaian pendapat di muka umum waktu-waktu dan tempat-tempat yang dilarang, harus mengkonfirmasi kepada polisi untuk melakukan demo atau aksi unjuk rasa tersebut sampai kepada barang-barang yang tidak boleh dibawa. Jika melanggar itu semua, Pendidikan kewarganegaraan pun harus memberi tahu bahwa ada resiko atau sanksi yang harus dijalani. Salah satu pasal yang berbicara

mengenai sanksi untuk para pelaku yang bertindak tidak baik ada pada UU 9 tahun 1998 orang yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk menghalangi kegiatan bersuara tersebut atau berpendapat tersebut saat di muka umum, maka pelaku tersebut dipidana paling lama 1 tahun. Hal ini termasuk sebuah kasus karena ia merampas hak kebebasan bersuara atau berpendapat warga negara Indonesia (Sundary, 2017).

Jauh sebelum kasus terjadi, tujuan pendidikan kewarganegaraan bisa dilihat dari awalan yang baik. Ada peribahasa yang mengatakan lebih baik mencegah daripada mengobati. Awalan yang baik adalah awalan di mana sikap dan karakter kita memiliki nilai yang arahnya ke positif (Suharyat, 2009). Penanaman karakter adalah modal awal sebelum kasus-kasus itu terjadi. Dari penanaman karakter di awal bisa menimbulkan kasus-kasus yang terjadi. Bukannya kasus harus dihindari? Dari awalan yang baik akan ada pandangan-pandangan yang berbeda sehingga awalan yang baik itu memiliki modal keberanian mengutarakan pendapatnya tetapi terkadang dengan keberanian yang cukup tinggi untuk mengeluarkan pendapat, kadang semakin keliru untuk menutup-mendengarkan pendapat orang lain. Masa pendapat sendiri paling benar dan pandangan orang lain itu dianggap salah padahal belum tentu. Dalam pendidikan kewarganegaraan, penanaman modal di awal bukan hanya berani untuk berpendapat tetapi menghargai pendapat orang lain juga. Karena dengan tidak adanya kata menghargai itu sendiri kepada orang lain, maka individu tersebut telah merebut hak dia untuk berbicara dan menyampaikan pendapatnya. Pendidikan Kewarganegaraan dengan demikian berwujud penanaman karakter yang bisa dalam kondisi apapun (Wahyuni, & Hasanah, 2016).

Simpulan

Permasalahan di negara Indonesia akan terus ada. Bukan lagi mereka yang dulu berjuang untuk merebut kemerdekaan itu sendiri, dan bukan lagi perjuangan itu bertaruh dengan nyawa. Tapi sekarang akan menceritakan hari ini dan esok. Bagaimana esok adalah langkah yang dimulai dari sekarang. Masyarakat dengan masyarakat tidak akan saling membantu satu sama lain apabila tidak ada kontribusi ajakan membangun negara ini jika bukan dari pemegang yang akan memimpin bangsanya beberapa tahun kemudian. Mahasiswa di tahap ini individu akan diuji bagaimana kita berproses untuk memecahkan masalah yang ada dan timbul di kehidupan sehari-hari. Untuk memberikan pemecahan masalah tersebut, mahasiswa harus tahu apa yang menjadi kewajiban dan hak dia sebagai mahasiswa dan hak dan kewajiban dia sebagai warga negara yaitu warga negara Indonesia. Sehingga apabila dia tahu akan hal tersebut, dia kan siap menanggung resiko apa yang akan dia langkahkan ke depan. Sehingga mengetahui segala resiko harus dimulai dari pedomannya sendiri, pedoman lingkungan yang diami, yang dikemas dalam pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan sangatlah penting untuk mahasiswa. Bukan hanya sebagai pengetahuan sejarah terbentuknya bagaimana Indonesia terjadi, melainkan isi negara ini. orang yang akan dibutuhkan beberapa tahun kedepan bukanlah orang yang bisa hafal seluruh pasal yang ada di Undang-Undang Dasar 1945 beserta poin-poin sampai tanda bacanya, melainkan orang yang berani berjuang untuk merealisasikan itu semua di tengah masyarakat.

Referensi

- Akbar, I. (2016). Demokrasi Dan Gerakan Sosial (Bagaimana Gerakan Mahasiswa Terhadap Dinamika Perubahan Sosial). *Jurnal Wacana Politik*, 1(2), 107-115.
- Gultom, A. F. (2010). Dialog Transformatif Agama Dan Kekerasan. *JPAK: Jurnal Pendidikan Agama Katolik*, 4(2), 279-289.
- Gultom, A. F. (2016). Enigma Kejahatan dalam Sekam Filsafat Ketuhanan. *Intizar*, 22(1), 23-34. <https://doi.org/10.19109/intizar.v22i1.542>
- Ila, B., & Ladamay, I. (2021). Pembentukan Karakter Gemar Membaca Melalui Gerakan Literasi Sekolah Tahap Pembiasaan di Sekolah Menengah Pertama. *De Cive : Jurnal Penelitian*

- Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, 1(1), 1–6. Retrieved from <https://journal.actual-insight.com/index.php/decive/article/view/10>
- Ismail Nurdin, M. S. (2017). *Etika Pemerintahan: Norma, Konsep, dan Praktek bagi Penyelenggara Pemerintahan*. Lintang Rasi Aksara Books.
- Istichomaharani, I. S., & Habibah, S. S. (2016). Mewujudkan peran mahasiswa sebagai “agent of change, social control, dan iron stock”. In *Prosiding Seminar Nasional (Vol. 2, pp. 1-6)*.
- Muhibbin, A., & Sumarjoko, B. (2016). Model pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan berbasis isu-isu kontroversial di media massa untuk meningkatkan sikap demokrasi mahasiswa dan implikasinya bagi masyarakat madani. *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 26(1), 1-10.
- Novianti, E., Firmansyah, Y., & Susanto, E. (2021). Peran Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sebagai Fasilitator dalam Meningkatkan Disiplin Belajar Siswa. *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 1(1), 13–18. Retrieved from <https://journal.actual-insight.com/index.php/decive/article/view/6>
- Saubani, (30 Maret 2021). Dua Pasal Revisi UU Otsus dan Suara Penolakan dari Papua, dalam harian *Republika*. Retrieved from <https://www.republika.co.id/berita/qqs3qv409/dua-pasal-revisi-uu-otsus-dan-suara-penolakan-dari-papua>
- Sunday, R. I. (2017). Pengaturan pembatasan pemanfaatan teknologi informasi dihubungkan dengan kebebasan berpendapat dan berekspresi di Indonesia. *Prosiding CELSciTech*, 2, law_1-law_9.
- Ubaedillah, A. (2016). *Pendidikan Kewarganegaraan Pancasila, Demokrasi dan Pencegahan Korupsi*. Prenada Media.
- Wadu, L. B., Kasing, R. N. D., Gultom, A. F., & Mere, K. (2021, April). Child Character Building Through the Takaplayer Village Children Forum. In *2nd Annual Conference on Social Science and Humanities (ANCOSH 2020)* (pp. 31-35). Atlantis Press.
- Wahyuni, D. E., & Hasanah, S. A. (2016). Pendidikan Karakter Berbasis Kearifan Lokal Pembentuk Karakter Bangsa. *FKIP e-Proceeding*, 19-24.
- Winataputra, U. S. (2008). Multikulturalisme-Bhinneka Tunggal Ika Dalam Perspektif Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Wahana Pembangunan Karakter Bangsa Indonesia. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 14(75), 1009-1027.
- Yuliatwati, Y. (2019). *Penegakan Hukum Terhadap Aksi Unjuk Rasa Mahasiswa Yang Menimbulkan Kerusakan Pada Fasilitas Umum Dalam Tinjauan Kriminologi (Doctoral Dissertation, Universitas Ahmad Dahlan)*.
- Zaini, A. (2018). *Demokrasi: Pemerintah oleh Rakyat dan Mayoritas*. *Al-Ahkam*, 14(2), 25-41.